

2025



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2025**

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW**

**"Meningkatnya Jaminan
Layanan Pendidika**

205

1000 2000
1000 2000
1000 2000
1000 2000
1000 2000
1000 2000

1000 2000
1000 2000
1000 2000

1000 2000
1000 2000

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Berkat dan Rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025, Kinerja Dinas yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 ini disusun berdasarkan dari laporan Kepegawaian, Program dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 Dinas Pendidikan. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangan baik kelengkapan maupun akurasi serta ketepatan waktu maupun penyajiannya untuk itu guna kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah ini di masa datang kami harapkan kritik dan saran dari pembaca.

Demikian atas bantuan berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.



ABDULLAH MOKOGINTA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670728 198903 1 006

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan (LKIP)

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi Dinas Pendidikan	2
C. Kondisi Aparatur	4
Dinas Pendidikan	8
D. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kab.Bolaang Mongondow	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Organisasi	49
B. Saran Tindak Lanjut	50

Tabel**Halaman**

1.1 Komposisi ASN Pergolongan Pada Dinas Pendidikan Tahun 2025	3
1.2 Tingkat Pendidikan Fimal ASN/Pegawai Dinas Pendidikan	4
1.3 Kondisi ASN Pertenaga	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdik 2023-2026	9
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Disdik Tahun 2025	10
2.3 Indikator Kinerja Utama	11
3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas layanan pendidikan	17
3.2 Kesimpulan Capaian Kinerja	18
3.3 Perbandingan Capaian Anggaran 2025 dan 2026	20
3.4 Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja	20

Gambar**Halaman**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	4
--	---

Lampiran

- I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
 - III. Rencana Aksi Tahun 2025
 - IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
 - V. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025
-

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan hal tersebut telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut TAP MPR dimaksud. Dalam pelaksanaan produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), atau sekarang sering disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Pendidikan adalah Dinas Tipe B yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah Melaksanakan pendidikan melalui jalur Sekolah dan Pendidikan luar Sekolah dengan mengacu pada UU NO.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan Nasional;
 - b. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan Dinas;
 - c. Membina penyelenggaraan pendidikan TK, SD, SDLB, dan SMP;
 - d. Membina, mengurus dan mengadministrasikan sarana dan prasarana;
 - e. Membina dan mengurus pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar.
 - f. Memberi izin operasional pendirian sekolah swasta dan lembaga pendidikan keterampilan.
-

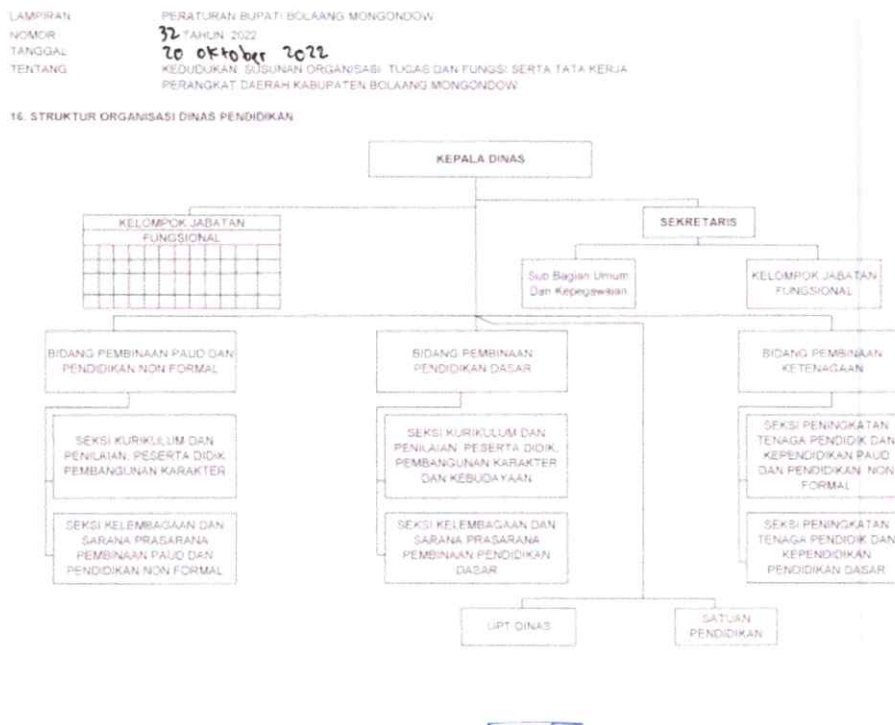
Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaiberikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - a. Kasie Kurikulum dan Penilaian Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Kebudayaan.
 - b. Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-formal/Informal (PNFI)
 - a. Kasie Kurikulum dan penilaian peserta didik pembangunan karakter.
 - b. Kasie kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan Pendidikan non formal
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a. Kasie Peningkatan Tenaga dan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal
 - b. Kasie Peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur dinas pendidikansebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Dinas Pendidikan



C. KONDISI APARATUR

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 2.800 pegawai yang terdiri dari Golongan IV 409 orang, Golongan III sejumlah 915 orang, Golongan 82 dan Golongan I berjumlah 1 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah in

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (Keadaan Per 31 Desember 2025)

1 JUMLAH ASN MENURUT JENIS KELAMIN

KATEGORI PEGAWAI	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PNS	460	947	1407	
PPPK	339	1054	1393	
TENAGA KONTRAK/THL				
Jumlah	799	2001	2800	

2 JUMLAH PNS MENURUT JABATAN

$$\begin{aligned} & \text{Let } x = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cos \theta, \quad y = \frac{1}{2} \sqrt{2} \sin \theta, \quad z = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cos \theta \\ & \text{Then } x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2} \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \cos^2 \theta = \frac{1}{2} (2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ & = \frac{1}{2} (2 \cos^2 \theta + 1 - \cos^2 \theta) = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Let } x = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cos \theta, \quad y = \frac{1}{2} \sqrt{2} \sin \theta, \quad z = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cos \theta \\ & \text{Then } x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2} \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \cos^2 \theta = \frac{1}{2} (2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ & = \frac{1}{2} (2 \cos^2 \theta + 1 - \cos^2 \theta) = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \theta) \end{aligned}$$

Table 1. Data for the first part of the problem.

θ	x	y	z	$x^2 + y^2 + z^2$
0	0.7071	0	0.7071	1.0000
$\frac{\pi}{4}$	0.5	0.5	0.5	0.7500
$\frac{\pi}{2}$	0	0.7071	0	0.5000
$\frac{3\pi}{4}$	-0.5	0.5	-0.5	0.7500
π	-0.7071	0	-0.7071	1.0000
$\frac{5\pi}{4}$	-0.5	-0.5	-0.5	0.7500
$\frac{3\pi}{2}$	0	-0.7071	0	0.5000
$\frac{7\pi}{4}$	0.5	-0.5	0.5	0.7500
2π	0.7071	0	0.7071	1.0000

$$\begin{aligned} & \text{Let } x = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cos \theta, \quad y = \frac{1}{2} \sqrt{2} \sin \theta, \quad z = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cos \theta \\ & \text{Then } x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2} \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \cos^2 \theta = \frac{1}{2} (2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ & = \frac{1}{2} (2 \cos^2 \theta + 1 - \cos^2 \theta) = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \theta) \end{aligned}$$

Jabatan Position	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Struktural / Structural	6	3	9	
Eselon II.A	0	0	0	
Eselon II.B	0	1	1	
Eselon III.A	0	0	0	
Eselon III.B	2	0	2	
Eselon IV.A	4	2	6	
Eselon IV.B	0	0	0	
Fungsional Tertentu / Specific Functional	746	1897	2643	
Fungsional Umum / Staf General Functional	47	101	148	
Jumlah /Total	799	2001	2800	

3 JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT KEPANGKATAN

Golongan Kepangkatan Hierarchy	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Golongan I / Range I	1	0	1	
I/a (Juru Muda)	0	0	0	
I/b (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0	
I/c (Juru)	0	0	0	
I/d (Juru Tingkat I)	1	0	1	
Golongan II / Range II	30	52	82	
II/a (Pengatur Muda)	2	2	4	
II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	1	9	10	
II/c (Pengatur)	14	29	43	
II/d (Pengatur Tingkat I)	13	12	25	
Golongan III / Range III	283	632	915	
III/a (Penata Muda)	30	75	105	
III/b (Penata Muda Tingkat I)	125	291	416	
III/c (Penata)	42	84	126	
III/d (Penata Tingkat I)	86	182	268	
Golongan IV / Range IV	146	263	409	
IV/a (Pembina)	51	95	146	
IV/b (Pembina Tingkat I)	77	151	228	
IV/c (Pembina Utama Muda)	18	17	35	
IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0	0	
IV/e (Pembina Utama)	0	0	0	
Golongan PPPK	339	1054	1393	
I	0	0	0	
III	0	0	0	
V	3	7	10	
VII	0	0	0	
IX	336	1047	1383	

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X	0	0	0	
Jumlah / Total	799	2001	2800	



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

4 JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan Terakhir Educational Attainment	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sampai dengan SD	0	0	0	
SLTP / Sederajat	0	0	0	
SLTA / Sederajat	65	116	181	
Diploma I	0	0	0	
Diploma II	31	42	73	
Diploma III	8	2	10	
Diploma IV	0	0	0	
Strata 1 / S1 / Bachelor's Degree	683	1830	2513	
Strata 2 / S2 / Master's Degree	12	11	23	
Strata 3 / S3 / Doctoral	0	0	0	
Jumlah / Total	799	2001	2800	

5 JUMLAH PNS MENURUT AGAMA

AGAMA Religion	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ISLAM	466	1188	1656	
KATOLIK	9	44	53	
PROTESTAN	225	657	882	
HINDU	97	112	209	
BUDHA	0	0	0	
Jumlah / Total	799	2001	2800	



D. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pendidikan menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu :
 - Kurang adanya kesadaran orang tua untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini,
 - masih banyaknya penduduk anak usia dini yang belum teridentifikasi di satuan pendidikan anak usia dini,
 - belum memadainya sarana dan prasarana PAUD di beberapa Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Sumber daya manusia yang masih terbatas.
- b. Permasalahan Pendidikan Dasar
 - Pelayanan sarana dan prasarana di Bidang Pendidikan Dasar belum merata.
 - Banyaknya anak putus sekolah.
 - Sumber daya manusia yang masih terbatas.
 - Evaluasi belajar mengajar yang tidak termonitoring.
 - Adanya perilaku dan sikap peserta didik dalam kehidupan(kesenjangan sosial)
- c. Pendidikan Non Formal
 - Taraf hidup masyarakat yang miskin
 - Rendahnya semangat untuk bersekolah
 - Sumber daya manusia yang rendah
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi program pemerintah untuk kesetaraan Paket A, B dan C.
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Masih ada Guru PNS dan Non PNS yang belum bersertifikat Pendidik.
 - Kualitas Guru yang belum merata.
 - Tidak maksimalnya pendataan dan pemetaan guru disatuan pendidikan.
 - Banyaknya guru yang tidak produktif.



e. Bidang pengelolaan sarana prasarana

- Koordinasi antara Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dengan Pemerintah Pusat (Kemendikbud) dalam penentuan alokasi sasaran sekolah penerima kegiatan dari Pemerintah Pusat (APBN) kurang maksimal.
- Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah (isian penjangkaran data oleh sekolah tidak akurat; pemanfaatan DAK telah diatur dengan sangat rinci dalam bentuk juknis yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah).
- Sekolah tidak optimal memanfaatkan barang hasil pengadaan (kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap pemanfaatan barang kepada sekolah penerima bantuan).
- Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
- Masih banyaknya sekolah yang kurang memperhatikan tata kelola aset.
- Permasalahan status tanah sekolah.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah disajikan pada Tabel 1.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Tabel 1.3 Faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

MENUNJU BOLAANG MONGONDOW HEBAT				
Visi				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemerintah yang bersih dan tertatalaksana, Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal	1. Kelembagaan Dinas Pendidikan Kab. Bol- Moong	Koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait Pendidikan masih kurang	Adanya Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
		2. Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu :	- Kurang adanya kesadaran orangtua untuk mendukung program Pendidikan AnakUsia Dini, - masih banyaknya penduduk anak usia dini yang belum teridentifikasi di satuan pendidikan anakusia dini, - belum memadainya sarana dan prasarana PAUDdi beberapa Lembaga Satuan Pendidikan AnakUsia Dini. - Sumber daya manusia yang masih terbatas.	(1)Aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, (2) Dukungan Anggaran, (3) Dukungan DPRD Kab. Bolaang Mongondow



		3. Permasalahan Pendidikan Dasar	- Pelayanan sarana dan prasarana di Bidang Pendidikan Dasar belum merata. - Banyaknya anak putus sekolah. - Sumber daya manusia yang masih terbatas. - Evaluasi belajar mengajar yang tidak termonitoring. - Adanya perilaku dan sikap peserta didik dalam kehidupan (kesenjangan sosial)	
		4. Pendidikan Non Formal	- Taraf hidup masyarakat yang miskin - Rendahnya semangat untuk bersekolah - Sumber daya manusia yang rendah - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi program pemerintah untuk kesetaraan Paket A, B dan C.	



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

		5.Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Masih ada Guru PNS dan Non PNS yang belum bersertifikat Pendidik. - Kualitas Guru yang belum merata. - Tidak maksimalnya pendataan dan pemetaan guru disatuan pendidikan. -Banyaknya guru yang tidak produktif.	
--	--	------------------------------------	---	--



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan, adapun pengertian Rencana Strategis tidak lain adalah *“susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan oleh setiap organisasi, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”*.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2023 -2026, Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow:

**“Bolaang Mongondow Yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing dan Mandiri
Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”**



Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow 2023 -2026, yaitu :

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan danberkelanjutan.
3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis dan Bebas KKN
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Menetapkan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai yakni :

Tujuan :

- Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan yang merata dan berkualitas
- Indikator Kinerja tujuan :
- Indeks Pendidikan

Sasaran :

- Meningkatnya jaminan layanan pendidikan

Indikator Sasaran :

- Angka Rata – Rata Lama Sekolah
- Angka Harapan Lama Sekolah

Adapun Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dapat pada Tabel berikut :



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan 2023-2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke.			
						2023	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan	13,50	Meningkatnya jaminan layanan pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,01	8,02	8,03	8,04	8,04
					Angka Harapan Lama Sekolah	11,7	11,8	11,9	12	12

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Pendukung	Anggaran(Rp)
1	Meningkatnya jaminan layanan pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,03	Program Pengelolaan Pendidikan	94.316.604.308,93
		Angka Harapan Lama Sekolah	11,9		
				Program Pengembangan Kurikulum	224.671.104,00



Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target
1.	Meningkatnya akses dan jaminan layanan pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	8,03
		Angka Harapan Lama Sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke-i)$ dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	11,9



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator



sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.



Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah :

Sasaran: Meningkatnya jaminan layanan pendidikan

Pengukuran capaian kinerja sasaran : “meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan” dengan indikator sasaran angka harapan lama sekolah dan angka rata rata lama sekolah dapat dihitung dengan rumus sebagaiberikut:

AHLS

=

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.



ARRLS=

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$$

dengan:

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke- i =

- a. Tidak pernah sekolah = 0
- b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Adapun analisis pencapaian sasaran Strategis Dinas Pendidikan dapat dilihat dari analisis dibawah ini :

Tabel 3.1

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN
"MENINGKATNYA JAMINAN LAYANAN PENDIDIKAN"

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	8,49 Tahun	102,29%
2	Angka Harapan Lama Sekolah	11,9 Tahun	11,82 Tahun	99,33%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN		101,88%		

Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, atau Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:

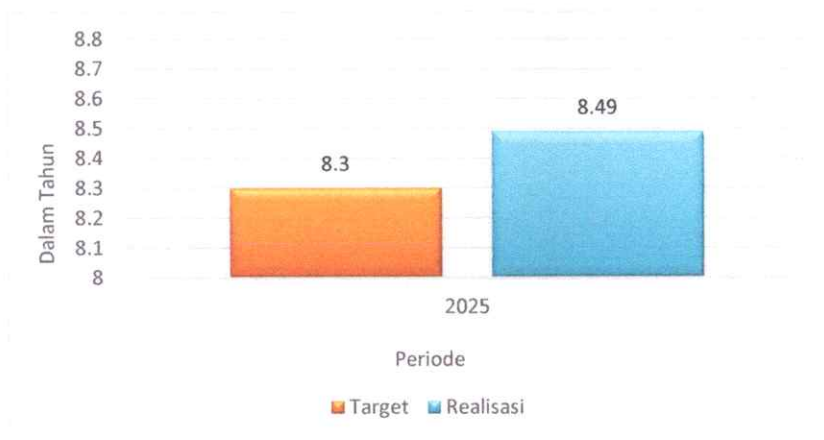
- a. Partisipasi sekolah.
- b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki.
- c. Ijazah tertinggi yang dimiliki.
- d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki holder yang ada guna Kualitas Pendidikan yang lebih baik.



Berdasarkan tabel diatas Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2025 dengan target Renstra sebesar 8,3 Tahun terealisasi 8,49 Tahun presentase capaian kinerja sebesar 102,29 Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui dinas pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Lingkungan Sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondowdan melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada guna Kualitas Pendidikan yang lebihbaik. Dapat juga dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025



Adapun Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 3 Tahun terakhir dapat kita lihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Dalam Lima Tahun RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	8,36 Tahun	8,38 Tahun	8,49 Tahun

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Perkembangan Rata Rata Lama Sekolah Tiap Tahun meningkat 0,11, pada tahun 2025 dan Tahun 2024 dimana dapat kita lihat Capaian Rata Rata Lama

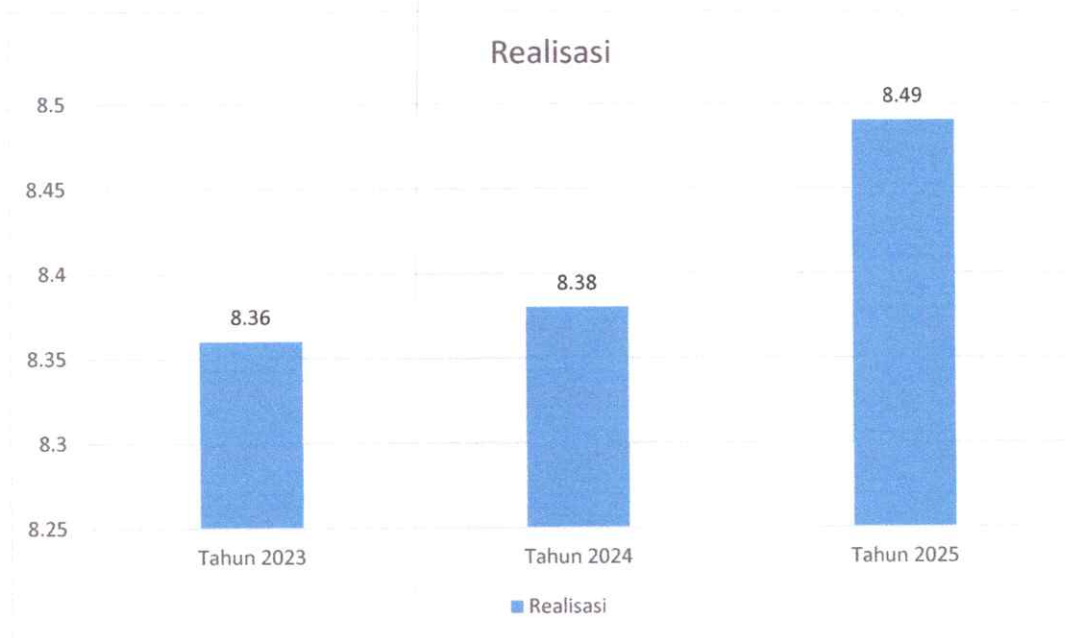


Sekolah pada Tahun 2025 menurut data yang ada mencapai 8,49 Tahun. Dibandingkan dengan Tahun 2024 ada Peningkatan sebesar 0,9 Tahun dari 8,38 Tahun, Adapun perbandingan pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Rata – Rata Lama Sekolah naik sebesar 0,9 Tahun dari 8,36 snTahun. Perkembangan Rata Rata Lama Sekolah selama 3 Tahun terakhir dapat juga kita lihat pada Grafik dibawah ini :

Tabel 3.4

Realisasi angka rata rata lama sekolah

Tahun 2023-2026



Adapun Perbandingan Rata rata lama sekolah antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat kita lihat pada tabel Berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2025

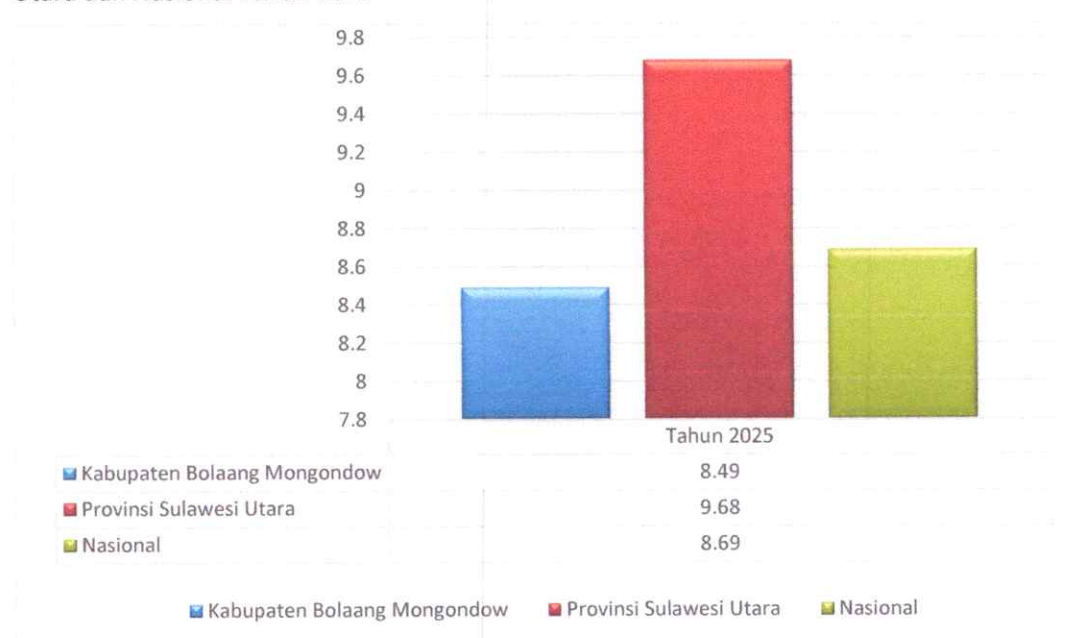
No	Indikator Kinerja	Kabupaten Bolaang Mongondw	Provinsi Sulawesi Utara	Nasional
		2025	2025	2025
1	Rata rata Lama Sekolah	8,49 Tahun	9,91 Tahun	9,07 Tahun



Tabel di atas menunjukkan perbandingan Rata rata lama sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2025. Kabupaten Bolaang Mongondow meraih Angka 8,49 Tahun. Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Sulawesi Utara pada tahun yang sama terdapat selisih 1,42 Tahun dari 9,91 Tahun. Selanjutnya perbandingan Capaian Provinsi Sulawesi Utara Lebih Tinggi dari Capaian Nasional sebesar 0,84 Tahun dari 9,07 Tahun. capaian Berikut disajikan perbandingan Capaian Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dalam bentuk Grafik :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2025



Berdasarkan tabel dan grafik diatas Capaian Rata Rata Lama Sekolah Tiap Tahun meningkat sebesar 0,19 Tahun. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui dinas pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Lingkungan Sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada guna Kualitas Pendidikan yang lebih baik.

Adapun Program Yang Mendukung Pencapaian Indikator Sasaran Adalah dengan Program Pengelolaan Pendidikan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019



Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umum umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka **Harapan Lama Sekolah** (HLS) didefinisikan sebagai lamanya **sekolah** (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Tabel di atas menunjukkan Capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 dari target Renstra 11,9 Tahun terealisasi 11,63 Tahun dengan Capaian Kinerja 99,33%. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Tabel 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025



Adapun perbandingan Angka Harapan Lama sekolah selang 3 Tahun Terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Dalam Lima Tahun RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1	Angka Harapan Lama Sekolah	11,63	11,65	11,82



Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, Selama periode 2023 hingga 2024 Angka harapan lama sekolah mencapai meningkat sebesar 0,02 persen pada Tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2025 yang sebesar 0,2 Tahun dari 11,82 Tahun Untuk detail Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat tergambar pada grafik berikut ini :

Tabel 3.9

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023-2025



Selanjutnya terkait Perbandingan Angka Harapan lama Sekolah antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat kita lihat pada tabel Berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2025

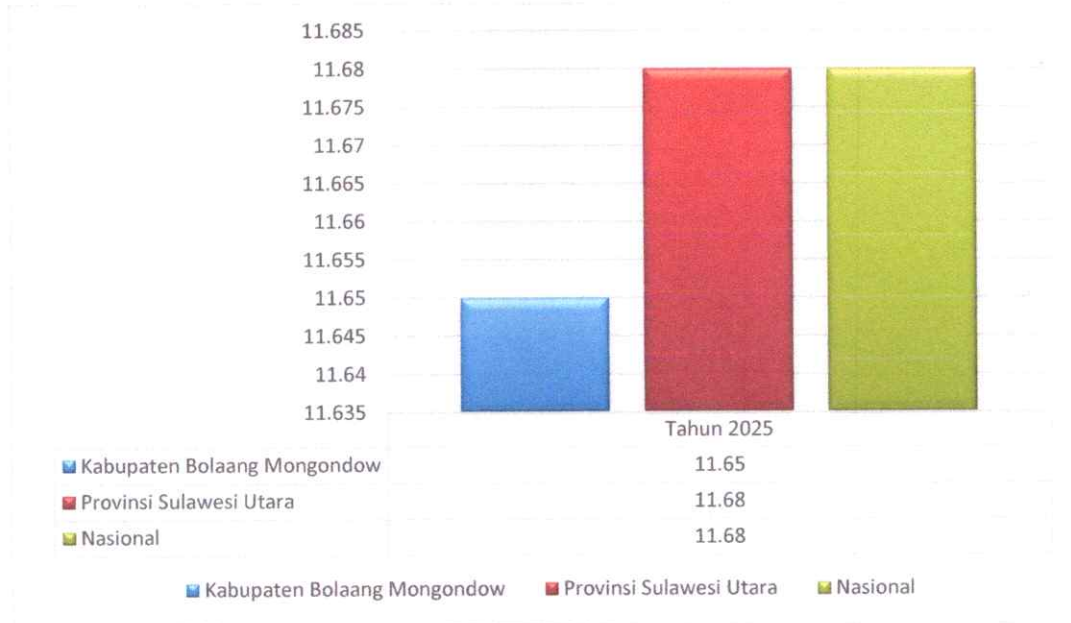
No	Indikator Kinerja	Kabupaten Bolaang Mongondw	Provinsi Sulawesi Utara	Nasional
		2025	2025	2025
1	Angka Harapan Lama Sekolah	11,82	12,98	13,30



Tabel di atas menunjukkan perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dalam Tahun 2025. Kabupaten Bolaang Mongondow meraih Angka 11,82 Tahun Pada tahun 2025. Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Sulawesi Utara pada tahun yang sama terdapat selisih 1,16 Tahun. Selanjutnya perbandingan Capaian Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian nasional pada tahun 2025 memperoleh selisih sebesar 0,32 Tahun. Berikut disajikan perbandingan Capaian Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dalam bentuk Grafik :

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2025



Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 menurut Data Badan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 terealisasi 11,68 Tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2025 Harapan lama sekolah di Sulawesi Utara mencapai 12,95 Tahun, berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Sarjana Muda atau Diploma I, Jika dilihat dari tahun sebelumnya tingkat pendidikan Kabupaten



DINAS PENDIDIKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

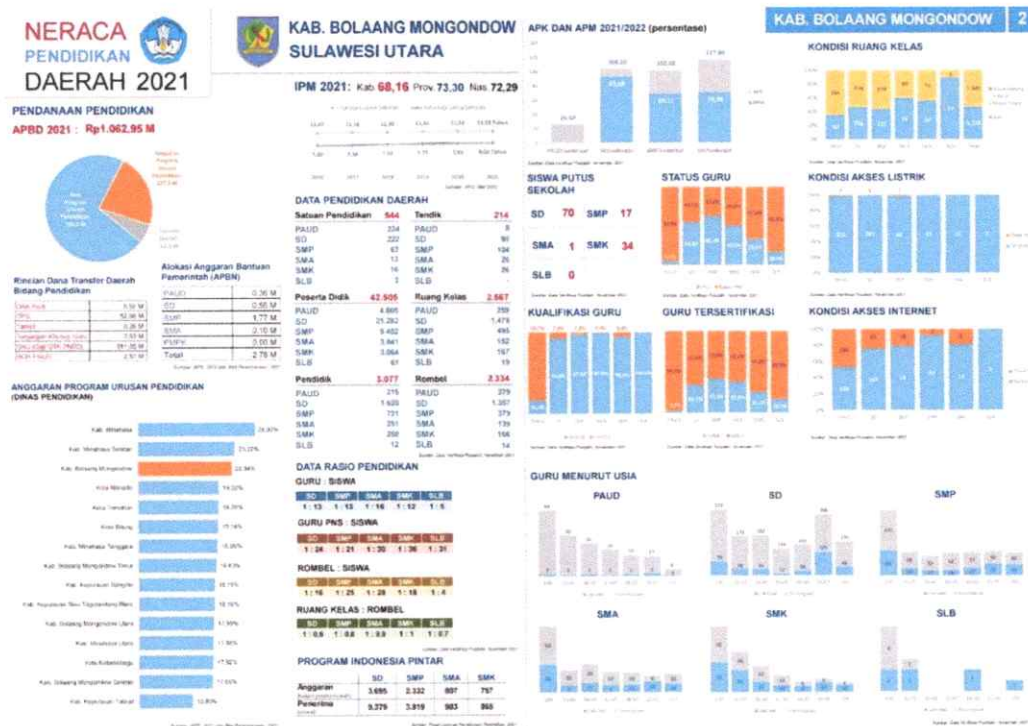
Bolaang Mongondow semakin baik dari tahun ke tahun.

Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui dinas pendidikan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan Sarana Prasarana serta stakeholder yang menunjang untuk Pendidikan bersama dengan perangkat daerah yang lain.

Adapun data Neraca Pendidikan Tahun 2023 dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1

Neraca Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow





KAB. BOLAANG MONGONDOW 4

PAUD

Ditertibkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Telepon 021-6711144
Agustus 2022

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DAK dan DAU Mandatory yang tertuang dalam DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD, DAK dan DAU Mandatory

Tahun anggaran 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan alokasi dana **Belanja Daerah** Rp. 357.414.363.379,80 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyad Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Puluh*). **Realisasi Belanja Daerah** sebesar Rp. 329.380.667.807,21 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah Koma Dua Puluh Satu*). Dengan rincian **Belanja Operasi** sebesar Rp. 321.147.819.510,49 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyad Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan*) **Realisasi Belanja Operasional** **Sebesar Rp 295.013.217.168,21** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyad Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Koma Dua Puluh Satu*) dan **Belanja Modal** Rp. 36.266.543.869,31, (*Tiga Puluh Enam Milyard Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Depalan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Satu*). Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp. 34.367.450.639 (*Tiga Puluh Empat Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) Apabila dipersentasikan $\pm 92,81\%$. Hal ini dapat dilihat pada table berikut. dapat dilihat. pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan capaian anggaran tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN TERSERAP	PROSENTASI PENYERAPAN	KET.(SISA ANGGARAN)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	357.414.363.379,80	329.380.667.807,21	92,81%	
	BELANJA OPERASI	321.147.819.510,49	295.013.217.168,21	91,86%	
	BELANJA MODAL	36.266.543.869,31	34.367.450.639,00	94,76%	
1.01.01	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
1.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	187.535.128.941,88	178.986.910.136,00	95,44%	
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	74.201.883.740,00	61.742.518.889,00	83,20%	
3	Belanja TPG PNSD	54.547.121.880,00	52.195.839.400,00	95,69 %	
4	Belanja TKG PNSD	1.118.567.300,00	1.026.074.200,00	91,73 %	
5	Belanja Tamsil PNSD	2.055.360.000,00	2.055.250.000,00	99,99 %	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.010.000,00	140.040.000 ,00	89,76 %	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	53.957.766,00	46.680.000,00	86,51 %	
1.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.069.920,00		0	
9	Falitasi Kunjungan Tamu	37.889.628,00	26.942.880,00	71,11 %	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.027,778,00	106.941.857,00	73,74 %	
1.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.875.000,00	12.000.000 ,00	33,45 %	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.000.000 ,00	493.000.000 ,00	99.40%	
1.01.01.2.09	PEMELIHARAAN MILIK DAEARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH				
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.345.109,00	55.227.925,00	45.59 %	
14	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.117.500,00	48.035.250,00	97.00 %	
1.01.01.2.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				
1.01.02	B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.01.02.2.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR				
16	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	62.856.788,95	62.520.216,00	99,46 %	
17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola	7.517.580.000,00	6.895.252.268	91.72%	

18	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4,761.479.170,00	4.610.307.672	99,83 %	
19	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.800.000.000,00	1.000.000.000	100 %	
20	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar	1.573.710.502,00	378.176.819	24.03 %	
21	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	535.804.943,92,00	523.500.000	97.70 %	
22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.914.878.441,21	20.618.363.211,21	98,58 %	
23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.668.928.000,00	3.426.134.896,00	93.38 %	
24	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.511.359,00		0 %	
25	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	213.815.200,00	210.766.500,00	98,57 %	
26	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	903.649.997,18	647.369.413 ,00	71.64 %	
27	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	310.932.486 ,00	175.027.659,00	56.29 %	
28	Pembangunan Ruang Kelas Baru	422,532.000 ,00	402.065.760 ,00	95.16%	
29	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	283.244.447,00	79.210.200 ,00	27.96 %	
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.854.920.000 ,00	5.209.535.239	99,75 %	
31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.159.135.700 ,00	5.146.021.712 ,00	99,75 %	
32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	1.181.127.800,00	0	0 %	
33	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20.801.800,00	0	0 %	
34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000,00	0	0 %	
35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	253.265.000 ,00	253.265.000,00	100 %	
36	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	242.781.231 ,00	74.417.500,00	30,65 %	
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.482.538.680 ,00	8.290.493.808 ,00	87,43 %	

1.01.02.2.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
38	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	698.400.000,00	665.521.113 ,00	95.29 %	
39	Pembangunan Laboratorium	3.521.100.000 ,00	3.117.881.201 ,00	88.55 %	
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.443.455.705	2.280.428.524,00	93.33 %	
41	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	279.689.564,92	233.951.522,00	83.65 %	
42	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.289.376.000,00	1.287.014.018,00	99.82 %	
43	Pengadaan alat praktik peraga peserta didik	5.045.601.000,00	5.007.896.198,00	99.25 %	
44	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100%	
45	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.760.240.892,00	1.198.081.476,00	68,06 %	
46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.920.379.668,84	9.722.621.074,00	98.01 %	
47	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	827.127.876,00	631.646.891,00	76,37 %	
48	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	294.680.493,82	221.417.770,00	75.14 %	
49	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.852.091.000,00	2.598.979.046,00	91.13 %	
50	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.610.910.000,00	1.470.540.671,00	91.29 %	
1.01.02.2.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)				
51	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.527.850.000,08	1.517.599.572,00	99,33 %	
52	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	101.397.130,00	9.343.000,00	9.21 %	
53	Pembinaan dan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.119.973.654,00	992.169.761,00	88.59 %	
54	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.522.855.000,00	2.338.943.700,00	92.71%	

55	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.196.927.289,00	780.983.298,00	66.08 %	
PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL / KESETARAAN					
56	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.475.570.000	1.474.211.900	99.91 %	
1.01.02.2.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
57	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	224.671.104		75,72 %	
	JUMLAH	357.414.363.379,80	329.380.667.807,21	92,15 %	

- **Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**
- Pendapatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu APBD, DAK dan DAU Mandatory Tahun 2025.
- Program Kegiatan
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Capaian Tarhet Kinerja 91,98 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Tarhet Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Capaian Tarhet Kinerja 77.91 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah capaian target kinerja keuangan 73,74%, tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perungan - undangan capaian target kinerja keuangan 0 %, tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sudah bisa di realisasikan perncanaan yang kurang mapan

- Fasilitas Kunjungan Tamu Capaian target kinerja keuangan 71,11% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Capaian target kinerja keuangan 33,45 % tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Capaian target kinerja keuangan 99,40% tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan capaian target kinerja keuangan 45,89% tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya capaian target kinerja keuangan 85,18% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar capaian target kinerja keuangan 92,88% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan**
-
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Capaian target kinerja keuangan 92,88% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah capaian target kinerja keuangan 91,72% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah capaian target

kinerja keuangan 100,00% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah capaian target kinerja keuangan 99,69% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah Capaian Target Kinerja Keuangan 96,83% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Capaian Target Kinerja Keuangan 100% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Capaian Target Kinerja Keuangan 24,03% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Capaian Target Kinerja Keuangan 97,70% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Capaian Target 98,58% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Capaian Target Kinerja Keuangan 93,38% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 0 % tidak ada

permasalahan tetapi penyerapan anggaran tidak direalisasikan tidak sesuai dengan kebutuhan

- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 98,57% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 71,64% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 56,29% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Ruang Kelas Baru Capaian Target Kinerja Keuangan 95,16% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 27,96% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah capaian target kinerja keuangan 88,98% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik capaian target kinerja keuangan 93,49% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama capaian target kinerja keuangan 95,29% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan**

- Pembangunan Perpustakaan Sekolah Capaian Target Kinerja Keuangan 95,29 % tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Laboratorium Capaian Target Kinerja Keuangan 88,55% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Capaian Target Kinerja Keuangan 93,33% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Capaian Target Kinerja Keuangan 83,65% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah Capaian Target Kinerja Keuangan 99,82% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Capaian Target Kinerja Keuangan 99,25% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Capaian Target Kinerja Keuangan 100,00% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Capaian Target Kinerja Keuangan 69,06% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Capaian Target Kinerja Keuangan 98,01% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 76,37%
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 75,14% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Ruang Kelas Baru Capaian Target Kinerja Keuangan 91,13% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah Capaian Target Kinerja Keuangan 91,29% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi penyerapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAUD)
Capaian Target Kinerja Keuangan 87,32% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi penyerapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Capaian Target Kinerja Keuangan 99,33% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran

direalisasikan sesuai kebutuhan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pengadaan Perlengkapan PAUD 99,66% Capaian Target Kinerja Keuangan 99,66% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Capaian Target Kinerja Keuangan 9,21% tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Capaian Target Kinerja Keuangan 88,59%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pengelolaan Dana BOP PAUD Capaian Target Kinerja Keuangan 92,71% tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di

realisasikan sesuai kebutuhan

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan Capaian Target Kinerja Keuangan 66,08% tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Capaian Target Kinerja 62,12 % tidak ada Permasalahan tetapi pertapan anggaran di realisasikan sesuai kebutuhan

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Capaian Target Kinerja Keuangan 99,91% tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

PROGRAM PENGEMBANGNA KURIKULIM

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar Capaian Target Kinerja Keuangan 0% ada permasalahan dan penyerapan anggaran direalisasikan tidak sesuai kebutuhan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana uraian pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dapat dinyatakan **Sangat Berhasil**. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 mencapai 101,80%. Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis dinas 2023-2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi dinas tahun 2023-2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow. Berbagai upaya maksimal melalui program dinas pendidikan yang dilakukan dimaknai sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara maksimal, khususnya di Bidang Pelayanan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana penunjang pembelajaran.
2. Sebagai unit kerja yang bersifat pelayanan Pendidikan pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan merupakan program yang sangat penting

where δ is the Dirac delta function and δ' is its derivative.

Let us consider the function

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

$$f(x) = \delta(x) + \delta'(x).$$

untuk menghindari birokrasi Pendidikan yang panjang dan berbelit – belit.

3. Dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dinas, sehingga semua pembiayaan kegiatan diupayakan tepat sasaran, dan tepat tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk keberlanjutan pembangunan.
4. Sebagai salah satu dinas yang diorientasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka diupayakan dengan melakukan pembinaan kepegawaian agar senantiasa terbentuk aparatur dengan integritas yang tinggi.
5. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat telah dan akan dilakukan terus sebagai forum untuk sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2023 s.d 2026.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah khususnya terhadap program pusat dan daerah.
3. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dinas Pendidikan yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2023-2026.
4. Meningkatkan pemantauan pembinaan pengawasan

terhadap Sekolah, Guru dan Siswa serta masyarakat.

5. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
7. Meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Pendidikan.

